



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI HALMAHERA
SELATAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI HALMAHERA
UTARA TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)**

(II)

JAKARTA,

JUMAT, 5 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Utara Tahun 2020

PEMOHON

1. Helmi Umar Muchsin, La Ode Arfan (Perkara Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Joel B. Wogono, Said Bajak (Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2012)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Halmahera Selatan
- KPU Kabupaten Halmahera Utara

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (I)

**Jumat, 5 Februari 2021, Pukul 13.03 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

AA Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Iskandar Sonhadji
2. Taufik Syahril Layn

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 09 dan 57/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hendra Kasim
2. Zulham Djaguna

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 09/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. AH. Wakil Kamal
2. Guntoro

D. Pemohon Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021:

Joel B. Wogono

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Nofebi Eteua
2. Roy Valiant Sembiring
3. Benny Hutabarat
4. Reli J Laike

F. Pihak Terkait Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Frans Manery
2. Muhlis Tapi Tapi

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Herry Hioruma
2. Albertus
3. Ramli Antula

H. Termohon:

1. Agus (KPU Halmahera Selatan)
2. Darmin Haji Hasim (KPU Halmahera Selatan)
3. Halid A. Radjak (KPU Halmahera Selatan)
4. Mochtar Alting (KPU Maluku Utara)
5. Abdul Djalil (KPU Halmahera Utara)

6. Sefriando Butakono (KPU Halmahera Utara)
7. Ircham Paludu Puni (KPU Halmahera Utara)

I. Bawaslu:

1. Asman Jameel (Bawaslu Halmahera Selatan)
2. Kahar Yasim (Bawaslu Halmahera Selatan)
3. Rais Kahar (Bawaslu Halmahera Selatan)
4. Muksin Amrin (Bawaslu Provinsi Maluku Utara)
5. Rafli Kamaludin (Bawaslu Halmahera Utara)
6. Iksan Hamiru (Bawaslu Halmahera Utara)
7. Ahmad Idris (Bawaslu Halmahera Utara)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini, sidang lanjutan untuk Perkara 09/PHP.BUP-XIX/2021 dan 57/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara. Dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, penyampaian keterangan Pihak Terkait, penyampaian keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti Para Pemohon. Dipersilakan, Perkara 09/PHPU.BUP-XIX/2019 Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon yang hadir pada Perkara Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021: saya sendiri, Iskandar Sonhadji, S.H., M.H. dan rekan saya Taufik Syahril Layn, S.H., M.H., terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya Pemohon 57/PHP.BUP-XIX/2021.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: NOFEBI ETEUA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Pemohon untuk Perkara 57/PHP.BUP-XIX/2021. Yang hadir saat ini, saya, Nofebi Eteua bersama rekan saya Roy Valiant Sembiring. Juga dihadiri oleh prinsipal melalui daring dan didampingi oleh rekan-rekan kami juga, Pak Benny Hutabarat dan Reli J Laike. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Ya, Termohon 09/PHP.BUP-XIX/2021.

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Saya Kuasa Hukum Termohon, Yang Mulia, Hendra Kasim. Ada juga Zulham Djaguna, Prinsipal kami yang hadir, Koordinator Divisi Teknis Bapak Darmin Haji Hasim, yang mengikuti secara daring ada Pak Agus Ketua KPU Halmahera Selatan dan Pak Halid Divisi Hukum, serta ada juga diikuti langsung oleh Divisi Hukum KPU Provinsi Pak Mochtar Alting. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon.

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukumnya masih sama, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, sama.

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya. Prinsipal yang hadir Koordiv Hukum KPU Halmahera Utara, Pak Abdul Djalil Jurumudi, di belakang, Yang Mulia. Adapun yang mengikuti secara daring adalah Pak Sefriando, Divisi Teknis dan Pak Ircham Divisi Data. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Pihak Terkait 09/PHP.BUP-XIX/2021.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia. Kami, yang hadir Kuasa Hukum, Ahmad Wakil Kamal dan Guntoro, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pihak Terkait 57/PHP.BUP-XIX/2021.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: HERRY HIORUMA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir dalam persidangan (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Yang keras. Belum ditekan itu.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: HERRY HIORUMA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami, yang hadir dalam persidangan ini, saya atas nama Herry Hioruma, S.H., M.Si. dan didampingi oleh Albertus, S.H. Hadir juga secara daring ... Pihak Terkait secara daring prinsipal Ir. Frans Manery dan Muhlis Tapi Tapi. Didampingi oleh Kuasa Hukum, Ramli Antula. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Bawaslu 09/PHP.BUP-XIX/2021. Bawaslu.

18. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: ASMAN JAMEEL

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb.

Yang hadir di sidang hari ini, saya atas nama Asman Jameel selaku Ketua Bawaslu Halmahera Selatan dan Pak Kahar Yasim selaku Koordinator Penindakan Bawaslu Halmahera Selatan dan juga yang mendampingi dari provinsi, Pak Muksin Amrin melalui daring dan salah satu anggota saya, dalam hal ini adalah Pak Rais Kahar, juga menghadiri lewat daring. Demikian, Majelis.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu, silakan.

20. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: RAFLI KAMALUDDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Saya Rafli Kamaluddin, selaku Ketua dan bersama dengan Koordinator Divisi Hukum Pak Iksan Hamiru dan yang hadir juga melalui daring Pak Ahmad Idris Koordinator Divisi Pengawas dan didampingi oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang sementara di Bawaslu Republik Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya, silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih. Saya lanjutkan, kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Apabila akan ada yang direnvoi, di awal disampaikan, ya dan itu hanya bersifat typo, ya. Kemudian bagi yang akan mengajukan tambahan bukti, silakan disegerakan, sebelum persidangan ini selesai, ya. Jadi, semua masih bisa tercover untuk kita verifikasi dan disahkan. Selanjutnya, kepada Termohon untuk Perkara 09/PHP.BUP-XIX/2021, karena sudah ... saya lihat wajahnya dari pagi, sama ini kelihatannya, ya. Jadi, ini orangnya sama jadi sudah paham. Waktunya singkat, 10 menit. Pokok-pokoknya saja yang disampaikan, silakan.

23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya sebagai Kuasa Hukum Termohon Perkara 09/PHP.BUP-XIX/2021 menyampaikan jawaban atau tanggapan Termohon atas Permohonan Pemohon.

Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kedudukan hukum Pemohon.

Berdasarkan data agregat kependudukan jumlah penduduk Kabupaten Halmehera Selatan adalah 252.357 atau 252. 357 jiwa penduduk. Itu berarti berdasarkan Pasal 158 perbedaan paling banyak dari suara sah adalah 1,5%.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850 dan seterusnya, total suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan adalah 113.445 suara. Maka, 1,5% dari 113.445 suara adalah 1.702 suara. Adapun perolehan suara Pemohon adalah 51.097 suara. Sedangkan, perolehan suara Termohon ... eh, Pihak Terkait adalah 62.348 ... 48 suara, itu berarti ada selisih 11.251 suara atau 10% dari total suara sah. Melebihi batas

maksimal=1.702 suara. Maka, menurut Termohon dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) mohon dianggap dibacakan saja, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Karena kita dibatasi oleh waktu. Dalam pokok permohonan. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah termasuk ke dalam bagian yang tidak terpisah dengan keterangan di dalam bagian pokok permohonan. Bahwa Termohon menegaskan (suara tidak terdengar jelas) bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan berlangsung dengan baik, lancar, aman, tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Termohon adalah karena adanya pengurangan suara pada 139 TPS dan adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon pada saat 139 TPS yang sama. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana disebutkan tadi adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa sebagaimana asas hukum pembuktian dalil Pemohon mengenai penambahan atau pengurangan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil penghitungan Pemohon wajib dibuktikan oleh Pemohon. Bahwa jika Pemohon tidak dapat membuktikan dari mana angka hasil penghitungan perolehan suara versi Pemohon justru Pemohonlah yang telah melakukan penggelembungan dan pengurangan suara.

Bahwa adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah Pemohon sebesar=51.097 suara dan Pihak Terkait atau Calon Nomor Urut 2 Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam sebesar=62.348 suara. Bahwa berdasarkan tabel 1 halaman 8 permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan pada Kecamatan Bacan terdapat ... pada Kecamatan Bacan terdapat DPTb sebesar=903, sedangkan dipenggunaan hak pilih DPTb hanya sebanyak=758. Dengan demikian, terdapat selisih=145 adalah tidak benar. Untuk menjawab itu, Yang Mulia, kami ajukan T-5 dan kami urai di dalam tabel 1.5 tentang rekap jumlah pemilihan DPT dan pengguna hak pilih pada Kecamatan

Bacan. Di situ dapat diketahui bahwa jumlah pemilih DPTb pada Dapil I Kecamatan Bacan adalah sebanyak=758 pemilih dan pengguna hak pilih DPTb adalah sebanyak=758 pemilih.

Bahwa permohonan halaman 7 sampai dengan 11 mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon diakibatkan adanya pengurangan dan penambahan suara di 139 TPS. Bahwa Termohon tidak sekalipun mengurangi suara Pemohon, tidak pula menambah suara Pihak Terkait. Untuk membuktikan itu Pemohon menghadirkan Fomulir C.Hasil-KWK di 139 TPS yang didalilkan oleh Pemohon sebagai bukti, yakni Bukti T-6 dan Termohon mengurai perolehan suara di 139 TPS itu di dalam tabel 1.6, Yang Mulia.

Berikut, Pemohon juga mengurai dalam tabel 1.7. Perolehan suara berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan di 20 kecamatan yang didalilkan untuk membuktikan bahwa tidak terjadi pengurangan dan penambahan suara mulai dari proses pungut hitung, hingga rekapitulasi tingkat kecamatan. Selain 20 kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon karena di Halmahera Selatan itu ada 30 kecamatan, Yang Mulia, Pemohon juga mengurai angka perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan untuk 10 kecamatan yang tidak didalilkan oleh Pemohon. Itu di tabel 1.8, Yang Mulia.

Bahwa, rekap perolehan suara di 20 kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon dan 10 kecamatan yang tidak didalilkan oleh Pemohon adalah Pemohon mendapatkan perolehan suara=51.097 suara. Sedangkan Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara=62.348 suara. Kaitannya dengan dalil mengenai unsur terstruktur, sistematis, dan masif, Yang Mulia. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah kami sebutkan dalam jawaban permohonan ... jawaban Termohon tidak perlu kami bacakan serta pula penjelasan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mohon anggap dibacakan.

Bahwa unsur pelanggaran yang bersifat TSM merupakan unsur pelanggaran sifat penilaiannya bersifat kumulatif. Dimana suatu pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan harus mengandung unsur terstruktur, sistematis, dan masif secara bersamaan atau ketiganya harus terpenuhi secara bersamaan dalam suatu peristiwa hukum. Bahwa adapun dalil permohonan Pemohon tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang mengandung kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang mana kecurangan tersebut terlebih dahulu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dengan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti.

Termohon telah dihukum oleh DKKP dan mengakibatkan keputusan persyaratan calon untuk Pihak Terkait menjadi cacat dan harus dinyatakan sebagai tidak sah dan batal demi hukum.

Untuk dalil yang ini, Yang Mulia, dapat Pemohon jelaskan ... dapat Termohon jelaskan, bahwa partai politik pengusung Pihak Terkait sebelum PKPI dibatalkan adalah sejumlah 21 kursi, Yang Mulia. Minimal perolehan kur ... minimal partai pengusung itu adalah 6 kursi dari 30 kursi DPRD. Bahwa, setelah PKPI dilepas ketika Termohon mengeksekusi atau melaksanakan putusan DKPP untuk melepas dukungan PKPI, itu tersisa 19 kursi, Yang Mulia, sehingga masih melebihi minimal 6 kursi dukungan calon ... syarat pencalonan.

Selain itu, selain putusan DKPP, ada juga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon nomor 2 dan seterusnya yang mana menyebutkan bahwa perbuatan hukum yang oleh DKPP dinilai tidak ... oleh DKPP menilai Termohon melakukan perbuatan melanggar etik, namun oleh PTUN sebelumnya dinilai oleh Majelis Peradilan Tata Usaha Negara Ambon bahwa apa yang dilakukan Termohon dalam kegiatan pendaftaran adalah telah benar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kaitannya dengan dalil Pemohon mensahkan syarat calon Pihak Terkait padahal tidak berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 47 PKPU 1 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 394 dan seterusnya, Permendikbud 29 Tahun 2014, serta Permendikbud 14 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas, Termohon melakukan klarifikasi atas ijazah milik Usman Sidik ke SMA Muhammadiyah Ternate pada 8 September 2020 yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Pada waktu klarifikasi, Kepala Satuan Pendidikan di SMA Muhammadiyah Ternate yakni Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate menerangkan bahwa Usman Sidiq benar siswa SMA SMA Muhammadiyah ... SMA Swasta Muhammadiyah Ternate. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Termohon ini dilampirkan bukti, Yang Mulia, mulai dari Bukti T-20 sampai Bukti T-22.

Termohon ingin masuk ke pelanggaran dalam proses pilkada (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

2 menit lagi, ya?

27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia. Pelanggaran dalam proses pilkada yang berpengaruh pada hasil pilkada.

Bahwa permohonan nomor 28 sampai dengan 29 mendalilkan telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan tingkat Kecamatan Kepulauan Botanglomang oleh PPK dan (suara tidak terdengar jelas) dalam bentuk sebagai berikut.

Pemohon mendalilkan PPK tidak menerima keberatan Saksi Pemohon, Muksin Siwasiwan untuk mengeluarkan surat pindah pemilih dan daftar hadir Desa Paisumbaos adalah dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas atau kabur. Dimana Pemohon tidak menjelaskan secara rinci TPS berapa dan pelanggaran apa yang terjadi sehingga ada keberatan Saksi Pemohon pada saat verifikasi tingkat kecamatan.

Izin, Yang Mulia, ada beberapa TPS yang disebutkan oleh Pemohon namun ternyata tidak ada desa itu di kecamatan yang disebutkan, Yang Mulia. Ya tidak perlu kami sampaikan di sini karena keterbatasan waktu semuanya telah kami urai secara jelas dalam jawaban Termohon, Yang Mulia. Termohon mohon izin untuk masuk ke petitum, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850 dan seterusnya
3. Menetapkan perolehan suara akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon 01 memperoleh suara=51.097 suara

Pasangan Calon 02 perolehan suara=62.348 suara

Jumlah suara sah=113.445

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kasih ... hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya terima kasih, silakan saudara, giliran Pihak Terkait, begitu juga ya sampaikan pokok-pokok dari keterangannya, silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Izin, Yang Mulia. Sebelum dilanjutkan boleh dari Pemohon menyampaikan (...)

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon kenapa?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Ya ini terkait dengan jawaban dari Termohon (...)

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Ini di sini yang kami tidak dapat ... di petitumnya ini tidak ada, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh nanti bisa nanti, ya?

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kurang ... ada yang kurang di situ?

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti bisa langsung berhubungan dengan kepaniteraan, ya? Terima kasih.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Silakan sekarang Pihak Terkait.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait Usmad Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan ini menyampaikan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut, dalam eksepsi.

Pemohon tidak memuli ... memiliki kedudukan hukum. Penduduk Halmahera Selatan saat ini adalah=252.357 jiwa. Sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) adalah selisih untuk mengajukan permohonan adalah 1,5% sedangkan 1,5% dari surat ... total surat suara sah itu adalah=1.702 suara, Yang Mulia. Sedangkan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak=11.251 suara. Bahwa demi ... bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

Berdasarkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, mohon putusan ... mohon Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

b. Permohonan Pemohon tidak jelas. Ini kami tidak bacakan, Yang Mulia. Dianggap dibacakan saja (...)

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lanjutkan saja.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Ya, dibacakan. Tanggapan dan bantahan terhadap pokok permohonan.

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seruluh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa terhadap hasil rekapi ... rekapitulasi suara di tingkat TPS, desa kelurahan dan kecamatan sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, Pihak Terkait di atas tidak ada terjadi perubahan atau pergeseran ... pergeseran perolehan suara masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS desa, kelurahan, dan kabupaten. Bahkan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada mengajukan keberatan dan catatan di tingkat TPS dan telah menanda ... menandatangani form C-1 hasil.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon halaman 7 sampai 11, angka 1 sampai 3 pada pokoknya menyampaikan telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan surat suara Pihak Terkait di 139 TPS pada 20 kecamatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Terhadap dalil-dalil tersebut tidak dijelaskan secara rinci berapa suara Pemohon dan Pihak Terkait yang mengalami pergeseran, pengurangan, dan penambahan pada setiap TPS yang dimaksud dan terhadap hal tersebut, kami sudah menguraikan seluruh TPS, Yang Mulia, angka-angkanya sesuai dengan tabel-tabel yang di atas.
4. Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci tuduhan yang disampaikan tersebut oleh karenanya dalil ... dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
 - b. Tanggapan dan bantahan terhadap persoalan terstruktur, sistematis, dan masif mengenai persyaratan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait berkaitan dengan putusan d ... DKPP dan dukungan partai pk ... PKPI.

Termohon telah melaksanakan sebagaimana telah dijelaskan tadi, menjelaskan, melaksanakan, putusan DKPP, Yang Mulia. Bahwa jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebanyak 30 kursi. Dimana persyaratan pencalonan untuk dapat rekan pasangan ... pasangan calon adalah sebesar 6 kursi. Sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 849 dan seterusnya tertanggal 8 Desember 2020 telah menetapkan dan memuat jumlah kursi partai pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Usman Sidik dan Hasan Ali Bassan Kasuba sebanyak 19 kursi. Dengan demikian

berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, Pihak Terkait telah memenuhi syarat pencalonan.

Bahwa terkait putusan DKPP tersebut sebagaimana dalam amar putusan ... sebagaimana dalam amar putusnya bukanlah terkait dengan sah tidaknya partai politik PKPI. Namun, hal tersebut terkait dengan persoalan etik dalam proses dan prosedur dalam menjalankan kewenangan dari penyelenggara pemilihan. Terkait sah tidaknya dukungan partai politik yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan ranah sengketa administrasi pemilihan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dalil Pemohon ... Pemohon tersebut tidak berbuk ... terbukti dan mengada ... mengada-ada. Oleh karenanya, haruslah dikesampingkan. Tanggapan dan bantahan terhadap persoalan syarat administrasi pendidikan calon ... Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait. Bahwa terkait dalil permohonan dalam ... dalam permohonannya halaman 18 sampai halaman 28 yang pada pokoknya mere ... meragukan keabsahan dokumen yang digunakan sebagai syarat registrasi Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut juga telah dipersoalkan da ... dan diadili DKPP sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 161 dan seterusnya yang menilai KPU Halmahera Selatan telah melakukan klarifikasi kepada kepala sekolah SMA Muhammadiyah Ternate dalam ... dalam klarifikasi tersebut, kepala sekolah SMA Muhammadiyah Ternate, memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Usman Sidik adalah siswa SMA Swasta Muhammadiyah Ternate tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, dalil-dalil Pemohon haruslah dikesampingkan. Bantahan terhadap persoalan dalam proses pilkada yang berpengaruh pada hasil pemilihan ... ini kami sudah kami uraikan secara jelas, Yang Mulia. Langsung saja kepada petitem, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.
Terima kasih, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih. Sebelum ke Bawaslu, saya memang cek kembali dari jawaban Termohon ini yang disampaikan ke MK, ya. Ini harusnya kan 55 halaman, betul kan?

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, memang yang sampai ke saya juga tidak ada petitum ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, mohon izin, Yang Mulia ...

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini baru sampai 50 halaman.

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, mohon izin, Yang Mulia, itu mungkin karena di waktu ... dijilid, Yang Mulia. Karena yang (suara tidak terdengar jelas) terbiasa di saya itu lengkap. Nanti akan kami lengkapi, Yang Mulia, sisanya.

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau bisa sekarang aja, siapa yang diminta tolong, segera melengkapi.

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Supaya dia melengkapinya segera dan dibagikan.

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, gitu ya. Silakan sekarang ke ... Bawaslu, ya. Untuk Perkara Nomor ... berapa tadi ... 9/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan! Singkat ya, Bawaslu ya!

58. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Siap.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Seperti biasanya. Pokok-pokoknya.

60. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, keterangan atas pokok permohonan. Bahwa pada pokok permohonan poin 1 dan 2, halaman 7 yang didalilkan terkait dengan selisih perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan ber ... menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan merekapitulasi Model C.Hasil Salinan pada 493 TPS se-Kabupaten Halmahera Selatan, yang ada di tabel 1, Majelis, di keterangan. Bahwa perolehan suara berdasarkan rekapitulasi model C.Salinan, Pasangan Calon Nomor Urut 1=15.097 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 62.348 suara, sehingga selisih sebanyak 11.251 suara. Ini berdasarkan rekapitulasi Model C.Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

Dua, bahwa pada pokok permohonan poin 3 huruf b halaman 8, menguraikan terkait dengan selisih penggunaan DPTb, di 47 TPS di Kecamatan Bacan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut. Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan berdasarkan hasil pengawasan dan rekapitulasi model C.Salinan khususnya daftar pemilih tambahan di 47 TPS di Kecamatan Bacan, ada di tabel 2, pimpinan.

Yakni, menggunakan hak pilih pengguna (ucapan tidak terdengar jelas) 758 dan menggunakan hak pilih sebanyak 758, bukti terlampir pimpinan.

Bahwa, selanjutnya bahwa pada pokok permohonan poin 3 huruf a dan b halaman 8 menguraikan selisih perolehan akibat penambahan dan pengurangan kepada 139 TPS, Bawaslu Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan tabel 1, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada 139 TPS perolehan suara sebanyak 10.098 suara. Jumlah perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada 139 TPS sebanyak 22.793 suara. Dengan selisih sebanyak 12.704 suara. Bukti terlampir pimpinan.

Kemudian bahwa pada pokok permohonan angka 16 sampai 18 halaman 16 sampai 17. Yang mendalilkan terkait dengan syarat dukungan Partai Berkarya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 4 September 2020, Ketua Partai Berkarya atas nama Ikbal Fatah, dan sekretaris Partai Berkarya atas nama Ibrahim Hi Gafur, hadir di KPU Kabuapten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba. Kemudian, lanjut Pimpinan.

Pada pokok permohonan huruf C halaman 18 yang didalilkan terkait dengan verifikasi dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan bahwa, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan verifikasi dokumen persyaratan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, yang dilakukan pada tanggal 8 September 2020 di sekolah SMA Muhammadiyah Kota Ternate. Bahwa pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah menerangkan bahwa calon bupati atas nama Usman Sidik betul alumni SMA Muhamadyah Kota Ternate. Bukti juga ada dalam lampiran.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti berapa tadi?

62. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Bukti PK-07, Majelis.

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PK-07?

64. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya. PK-07.

65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut!

66. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Bahwa berdasarkan surat pelimpahan Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020, dengan Nomor Regis 09 dan seterusnya, terkait dengan laporan ... laporan pelanggaran ijazah palsu atas nama Calon Bupati atas nama Usman Sidik. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan setelah mendapatkan surat pelimpahan langsung menindaklanjuti dengan mengundang Sentra Gakkumdu untuk melakukan pembahasan pertama. Bahwa hasil pembahasan pertama, disepakati dalam Gakkumdu bahwa laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilihan, sehingga tidak dapat ditingkatkan pada proses penanganan selanjutnya.

Mohon izin, Yang Mulia. Lanjut. Bahwa pada pokok permohonan poin 35 angka 1 dan 2, halaman 3 ... 3, halaman 29 dan 30 menerangkan terjadi dugaan pelanggaran di Kecamatan Kasiruta Barat, Bawaslu Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kasiruta Barat di Desa Marikapal, Desa Kukupang, KPPS menulis hasil penghitungan suara menggunakan papan tulis sebagai ... sebagai langkah ikhtiar, kemudian disalin kembali pada Model C. Hasil KWK-Plano. Dengan tidak mengubah angka perolehan suara yang disaksikan oleh kedua saksi pasangan calon dan masyarakat yang hadir. Atas tindakan KPPS ini Bawaslu Halmahera Selatan sudah menindaklanjuti temuan pelanggaran kode etik, selanjutnya sudah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ayo.

68. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya. Sebentar sa ... bahwa pada pokok permohonan pada poin lima ... poin 50, halaman 34 yang menguraikan bahwa laporan dugaan pelanggaran telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menindaklanjuti laporan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dari ... dari Pelapor atas nama Syafri Nyong yang selanjutnya diberikan formulir tanda terima penerimaan laporan kepada pelapor.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan surat kepada pelapor untuk melengkapi dokumen dengan Nomor Surat 302 dan se ... selanjutnya perihal pemberitahuan ... pemberitahuan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan pelapor tidak melengkapi dokumen perbaikan, Bukti P-57.

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, 2 menit lagi.

70. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu kabupaten mengumumkan status kasus 17 dengan tidak meregistrasi. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dari pelapor atas nama Syafri Nyong yang selanjutnya diberikan formulir tanda terima penerima laporan kepada pelapor.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan surat kepada pelapor untuk melengkapi dokumen pela ... laporan dengan Nomor 319 dan selanjutnya perihal pemberitahuan. Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak melengkapi dokumen perbaikan laporan.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, Bawaslu mengumumkan status terkait laporan dan tidak dapat diregis karena tidak memenuhi unsur.

Demikian, Yang Mulia. Terakhir, demikian atas keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan ini dibuat dan sebenarnya, keterangan tertulis ini disetujui dalam ... dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Tertanda Pak Asman Jameel, S.H. Ketua, Kahar Yasim Anggota, Rais Kahar Anggota. Terima kasih, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Saya langsung konfirmasi dan klarifikasi, ya. Pertama ... yang pertama adalah terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi dulu, ya. Itu kapan dilakukan? Silakan, Komisioner boleh.

72. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Tanggal 15 Desember, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

15 Desember jam berapa?

74. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Penetapannya pukul 09.00 WIT.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 09.00 WIT pagi?

76. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Pukul 21.00 WIT malam, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 21.00 WIT malam, ya.

78. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Ya.

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 21.00 WIT malam, ya. Pukul 21.00 WIT.

80. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Pukul 21.00 WIT, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan ditulis nanti pukul 09.00 WIT lagi kayak kemarin itu, pukul 09.00 WIT ternyata malam, ya. Jadi, ini pukul 21.00 WIT, maksudnya

begitu? Kemudian ini dituangkan atau ditempelkan di papan pengumuman?

82. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Diumumkan di laman KPU Halmahera Selatan.

83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dilangsung diunggah di lamannya, ya?

84. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Benar, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jam berapa itu diunggah di laman?

86. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Pukul 21.30 WIT.

87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 21.30 WIT. Papan pengumumannya ada?

88. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Papan pengumumannya ada.

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di papan pengumuman juga ada?

90. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Ada.

91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jam berapa?

92. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Sama, jam setelah penetapan pukul 21.00 WIT itu ... Sembilan ... pukul 21.30 WIT itu kita langsung umumkan, baik di laman maupun di papan pengumumannya, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Belum jadi bukti, ini? Bukti mengenai proses penetapan dan yang ditetapkan di mana itu sudah jadi bukti?

94. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Belum, Yang Mulia ... belum, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Belum jadi bukti, ya. Tapi ini benar, ya, Bawaslu semua, ya? Terkait dengan penetapannya diumumkan dan diunggah di laman sudah benar?

96. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah benar, ya? Pihak Terkait?

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Benar, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon? Baik, ya. Ini hanya memastikan saja. Kemudian, yang berikutnya adalah tadi KPU mengatakan ada desa yang tidak ... ada di Kalsel ... di Halsel. Itu desa mana tadi? Sampaikan desa mana tadi?

100. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Ya, di permohonan itu disebutkan Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat.

101. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Desa?

102. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat.

103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu tidak ada di ... Halsel, enggak ada?

104. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Kecamatan Gane Barat tidak ada Desa Dolik, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Desa Holik, ya?

106. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Desa Dolik.

107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dolik, ya, ... Dolik tidak ada di Halsel, ya?

108. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Ada di Halsel, tapi bukan di Kecamatan Gane Barat, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ada di Halsel, tapi tidak ada di kecamatan?

110. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Gane Barat.

111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Adanya di kecamatan mana itu?

112. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Kecamatan Gane Barat Utara.

113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, baik. Jadi, tidak ada di situ, ya?

114. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Ya.

115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sudah ada buktinya, ini?

116. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Ada, Yang Mulia.

117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di T berapa

118. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Bukti T-36.

119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-36, ya, ya. Begini, salah satu dalil Pemohon juga mengenai rekap hasil itu kan ditem ... ditulis di papan tulis tadi, ya. Awalnya di tulis di papan tulis tadi Bawaslu juga menyampaikan begitu. Kemudian, sudah disalin di C-KWK Plano, betul? Betul, KPU?

120. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Kalau KPU, untuk informasi itu, kami tidak terima, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini ada rekomendasinya dari Bawaslu.

122. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Rekomendasi Bawaslu itu, itu rekomendasi terkait dengan kode etik penyelenggara dan sudah kami tindak lanjuti.

123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tadi Bawaslu juga menyampaikan.

124. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Ya.

125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, Bawaslu? Buktinya di T ... PK berapa, Pak? Di tuangkan pertama di papan tulis.

126. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

PK-19.

127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pk-19.

128. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya.

129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini KPU tidak tahu ini?

130. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ini hasil ... izin, Yang Mulia.

131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa ini?

132. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Bawaslu.

133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan.

134. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ini soalnya terkait dengan di ... sudah di Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

136. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ada saksi dari Paslon Nomor 01. Menerangkan bahwa memang di Desa Kukupang dan Markapal itu ada (...)

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di desa mana ini, Pak?

138. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Di Desa Mari Kapal dan Desa Kukupang.

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di TPS mana ini yang di tulis di papan tulis ini, Pak?

140. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Nah, di sini Cuma 1 ... 1 TPS saja.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

1 TPS saja. TPS mana, Pak?

142. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Di desa. Karena desa ini cuma 1 TPS.

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ooh, 1 TPS dalam 1 desa itu?

144. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya, ya.

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang kemudian dia tuangkan di papan tulis dulu.

146. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baru kemudian dia salinkan.

148. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Salin kembali di (...)

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di C-KWK Plano.

150. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya, ini juga terkonfirmasi saat klarifikasi.

151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di kecamatan?

152. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya. Kita, Bawaslu karena ini dijadikan temuan, karena ada laporan jadi kita memerintahkan jajaran untuk menindaklanjuti sehingga ini terkonfirmasi lewat hasil klarifikasi dalam penanganan pelanggaran.

153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, ini tanda tangan semua enggak? Di C-KWK Planonya?

154. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ditanda tangani.

155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ditanda tangani.

156. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya.

157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanda tangan di mana? Disalinnya di mana waktu itu?

158. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Di saat itu juga.

159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada saat pertama di papan tulis. Kemudian, di salin ke C-KWK Planonya disitu juga?

160. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya, dan memang itu disaksikan oleh semua (...)

161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semua menyaksikan itu?

162. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Tim dan masyarakat.

163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

164. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Tapi tidak merubah hasil perolehan suara.

165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak mengubah perolehan suaranya?

166. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Tidak.

167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama, ya?

168. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Sama.

169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kemudian, rekomendasi tidak ada soal itu, ya? Baik. Saya kira ... keberatan di mana, yang mulai ada keberatan, Pak? Bukti keberatan?

170. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Hanya di tingkat kecamatan.

171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di tingkat kecamatan itu?

172. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya.

173. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mulai dari setiap TPS ada keberatan enggak?

174. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Tidak ada. Izin, Yang Mulia. Untuk 493 TPS, di Kabupaten (...)

175. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

493 TPS?

176. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Se-Kabupaten Halmahera Selatan.

177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

178. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Pada Posisi tanggal 9 itu, dari hasil pengawasan Bawaslu hanya 1 TPS di Obi Selatan yang kemudian mendapat temuan pada hari H, Majelis. Bahwa, ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali dan ini kami sudah proses, hari itu juga.

179. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah diproses?

180. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya, dan ... dan prosesi untuk di TPS (...)

181. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian buktinya apa tuh, Pak?

182. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Tidak ada keberatan.

183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diapakan itu? karena dia lebih dari 1 kali?

184. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Nah, hasil ... hasil penanganan penyelenggaraan Panwascam Obi Timur.

185. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

186. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Atau Obi Selatan, bahwa, ini adalah terbukti. Nah, hasil terbukti itulah disampaikan ke kabupaten. Maka, kita di kabupaten menindak lanjuti karena ini adalah dugaan pelanggaran pidana, sehingga kami menindak lanjuti. Kami mengundang Gakkumdu untuk melakukan pembahasan pertama.

187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

188. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Dan kemudian, hasilnya, di pembahasan kedua, karena memang jaksa menilai bahwa buktinya lemah. Karena buktinya kita tidak dapat untuk daftar hadir. Karena daftar hadir sudah masuk dalam kotak, sehingga jaksa menilai bahwa ini susah untuk proses pembuktian.

189. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi betul ada (...)

190. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Tapi terbukti menggunakan (...)

191. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ganda?

192. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Hak pilih lebih dari 1 kali.

193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lebih dari 1 kali?

194. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya.

195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu terbukti?

196. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Terbukti.

197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cuma tidak bisa mengambilnya dalam kotak itu dan ... untuk melihatnya, ya. Itu di TPS mana, Pak?

198. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Di ...

199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

KPU tahu nih? Silakan dari KPU.

200. TERMOHON 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Ya.

201. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

DI TPS mana nih?

202. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Kalau di TPS 03 Desa Wayaloar, ya.

203. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di TPS?

204. TERMOHON 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

TPS 03.

205. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

03.

206. TERMOHON 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan.

207. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang keras, dong, Pak, suaranya.

208. TERMOHON 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Desa ... TPS 03 Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan.

209. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Desa Lelo?

210. TERMOHON 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Desa Wayaloar.

211. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Wayaloar.

212. TERMOHON 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Kecamatan Obi Selatan, di TPS 03.

213. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kecamatan apa?

214. TERMOHON 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Obi Selatan.

215. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Obi Selatan, ya. Jadi ada 1 yang kemudian mencoblos lebih dari sekali, Pak, ya?

216. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya, ya, Majelis. Jadi, di TPS 01 ke TPS 03. Dia melakukan (...)

217. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, TPS 01 dia ke TPS 03?

218. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya, benar.

219. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian apa rekomendasinya?

220. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Terkait dengan yang Obi Selatan, kita sudah merekomendasikan soal pelanggaran etik juga untuk penyelenggara tingkat bawah KPPS.

221. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

KPPS.

222. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya.

223. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti berapa ini, Pak?

224. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ini bukti P-34, Majelis Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

P-3.

226. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

4.

227. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PK-4.

228. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

PK ... PK-4, Yang Mulia, maaf.

229. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PK-4?

230. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

PK-34.

231. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PK-34, ya. PK-34.

Baik itu, jadi salah satu di situ ya dari 493 TPS, ya? Baik demikian untuk yang klarifikasi. Mungkin dari Pak Wahid?

232. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk menegaskan yang terakhir itu tentang adanya orang yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali TPS 1 Desa Wayaloar, ya? Kecamatan Obi Selatan. Menindaklanjuti nah tapi memang ada pidananya ini kan, ya, sekarang ada pidananya di Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016. Tapi kan oleh Panwas TPS dan kecamatan itu adalah harus diadakan pemungutan suara ulang. Nah, itu bagaimana?

233. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Izin, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

235. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Jadi, terkait dengan pemilihan ulang.

236. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pemungutan suara ulang, bukan pemilihan.

237. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kalau pemilihan itu seluruhnya.

239. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Suara ulang. Karena terjadi pemilih. Nah, di undang-undang setahu saya izin, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

241. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Pada saat saya itu karena di klausul itu menerangkan lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali (...)

242. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

243. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Yang ini hanya 1 orang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, cuma 1 orang.

244. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, memang ya 1 orang, ya?

245. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya, 1 orang. Jadi (...)

246. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi tidak ada harus diadakan pemungutan suara ulang.

247. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Pemungutan suara ulang.

248. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tapi dia kena pidana?

249. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya. Pidana. Karena itu kita karena hasil dari Panwascam menyatakan bahwa memang ini terbukti melakukan coblos lebih dari 1 kali, maka dari hasil rekomendasi itu pada hasil kajian itu kami Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan karena ini ada dugaan pidana, maka kami mengundang Sentra Gakkumdu untuk melakukan pembahasan. Dan itu naik sampai pada tingkat pembahasan tahap dua baru dihentikan karena kekurangan bukti, karena untuk membuktikan dia mencoblos lebih dari 1 kali ini harus dibuktikan dengan daftar hadir di dua TPS itu. Nah, ternyata daftar hadir sudah di dalam kotak, sehingga jaksa menilai bahwa ini lemah juga pada posisi untuk pembuktian.

250. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi kasusnya hanya 1, ya? Tidak lebih dari 1, ya?

251. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Siap, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang menggunakan hak pilih?

253. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Hak pilih.

254. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, di TPS 1, ya?

255. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya.

256. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Desa Wayaloar, ya.

257. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Wayaloar.

258. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Terima kasih.

259. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Mohon izin, Yang Mulia. Tambahan. KPU, Yang Mulia. Ya, untuk TPS 3 Desa Wayaloar itu. Berdasarkan daftar hadir Bukti T-37 pemilih atas nama Hamsir Yusuf itu hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali di TPS 3 berdasarkan daftar hadir yang kami dapatkan dalam kotak bahwa Saudara Hamsir Yusuf itu hanya melakukan ... melakukan pencoblosan 1 kali di TPS 3 Desa Wayaloar, karena nama dan yang bersangkutan tanda

tangan di daftar hadir TPS 3, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang dia juga di TPS 1 sudah dilihat?

261. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Ya, kalau yang di TPS (...)

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kan di TPS 1 tadi katanya Bawaslu itu?

263. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Ya. Di TPS 1 yang bersangkutan tidak ada namanya di sana, Yang Mulia.

264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada namanya?

265. TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: DARMIN HAJI HASIM

Ya, benar, Yang Mulia.

266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi Bawaslu menemukan ada namanya di situ? Dia mencoblos?

267. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Izin konfirmasi, Yang Mulia?

268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan.

269. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Nah, terkait dengan yang di Obi Selatan ini Pak ini bahwa dia menggunakan TPS di TPS 1 dia masuk ... eh, TPS 3 masuk dalam DPT.

270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi masuk ke DPT di TPS 3-nya?

271. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya, betul. Ya. Nah, di ke TPS 1-nya dia menggunakan ... menggunakan KTP.

272. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

273. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Mencoblos di TPS 1 dia menggunakan KTP.

274. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

275. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Jadi di situ.

276. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ada buktinya ini ya Pak yang penting PK-34 tadi, ya?

277. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya?

278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di PK-34 tadi buktinya, ya?

279. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya, Yang Mulia.

280. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik.

281. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jarak TPS 1 dengan TPS 3 itu berdekatan atau jauh?

282. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Kalau soal TPS saya kurang. Tapi karena Wayaloar itu desa yang besar, jadi kayaknya agak jauh juga, Yang Mulia. Tapi saya belum ... belum tahu pasti di situ karena itu kecamatan yang paling terluar.

283. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tapi dia dalam satu desa kan?

284. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

satu desa, Majelis.

285. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

satu desa kan, ya?

286. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Ya, Majelis. 1 desa.

287. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

288. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dalam perkara ini Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-49 buktinya, ya? Benar?

289. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

290. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-356, benar?

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Benar, Yang Mulia.

292. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lalu Bawaslu mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan PK-61, benar?

293. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN: KAHAR YASIM

Benar, Yang Mulia.

294. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, Pemohon mengajukan bukti tambahan P-4 sampai dengan P-31B, benar?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Benar, Yang Mulia.

296. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, lanjut ke pendalaman berikutnya.

297. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kita lanjutkan untuk perkara berikutnya perkara (...)

298. KETUA: ANWAR USMAN

57/PHP.BUP-XIX/2021.

299. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

57/PHP.BUP-XIX/2021, ya, silakan kepada Termohon sampaikan pokok-pokoknya saja waktunya 10 menit. Silakan.

300. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09 /PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

... terima kasih, Yang Mulia. Sebelum Termohon menyampaikan jawaban dan tanggapan Termohon, Termohon ingin menyampaikan ada 1 renvoi, Yang Mulia.

301. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya? Ada renvoi?

302. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09 /PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya Yang Mulia, 1 saja, Yang Mulia.

303. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di halaman berapa?

304. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Halaman 7, Yang Mulia.

305. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 7?

306. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09 /PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Angka 11.

307. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Angka 11?

308. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09 /PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

PJ bupati itu PJ-nya di hapus, Yang Mulia, bupati saja.

309. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya baik, lanjutkan!

310. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09 /PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 yang kami hormati, izinkan saya selaku Kuasa Hukum Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon pada sore hari ini.

Dalam eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan dan juga tindak pidana pemilihan. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan yang electoral justice system itu telah diatur dengan jelas dan rigid dalam Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa materi Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan tindak pidana pemilihan. Oleh

sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah Yang Mulia melainkan Bawaslu untuk dugaan pelanggaran administrasi dan Sentra Gakkumdu untuk urusan tindak pidana pemilihan.

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan 4 hal, Yang Mulia.

1. Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara pada TPS di PT Nusaha Halmahera Mineral, kecamatan Malifut terdapat 632 karyawan yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Utara.
2. Permohonan pemungutan suara ulang di TPS.
3. Rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan
4. Amplop yang membuat formulir D.Hasil Kecamatan-KWK berada dalam keadaan tidak tersegel.

Adapun pokok permohonan sebagaimana disebutkan oleh Termohon tadi tidak berkaitan dengan perselisihan hasil, Yang Mulia. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam pokok permohonan bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan a quo kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam jawaban Termohon ini.

Bahwa sebagaimana asas hukum pembuktian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Bahwa Termohon ... kaitannya dengan dalil Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara pada TPS di PT Nusa Halmahera Mineral, Kecamatan Malifut terdapat 632 karyawan yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Utara, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut.

Bahwa pada Jumat, 4 Desember 2020, PT NHM menulis surat nomor 935 dan seterusnya, perihal permohonan TPS Halut di Gosowong yang ditujukan kepada PJ Bupati Halmahera Utara pada pokoknya surat tersebut menjelaskan bahwa PT NHM telah menginformasikan data tentang jumlah karyawan PT NHM dan mitra kerja yang sudah bekerja dan tinggal di Kawasan tambang Gosowong pada tanggal 9 Desember 2020. Sehingga membutuhkan TPS dalam kawasan tambang Gosowong untuk menyalurkan hak suaranya.

Bahwa besok harinya pada hari Sabtu, 5 Desember 2020, Termohon melalui Surat Nomor 191 dan seterusnya perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada PT NHM yang isinya pada pokoknya menjelaskan hari pemungutan penghitungan suara pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020.

Menanggapi surat Termohon sebagaimana disebutkan tadi, pada hari Minggu, 6 Desember 2020 PT NHM melalui surat nomor 9361 dan seterusnya perihal situasi operasional tambang Gosowong PT NHM dan Pilkada Halut yang ditujukan kepada Termohon pada pokoknya menjelaskan situasi operasional tambang Gosowong PT NHM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Sehingga berharap agar Termohon dapat memfasilitasi ... memfilitasi TPS yang dapat dijangkau oleh karyawan PT ... karyawan dan mitra kerja PT NHM. Tanpa harus keluar dari kawasan tambang untuk dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa berinteraksi dengan orang lain dengan jumlah besar.

Bahwa respon surat dari PT NHM Mineral sebagaimana disebutkan tadi, Yang Mulia, Termohon pada Senin, 7 Desember 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara menyelenggarakan rapat bersama dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan Badan Kesbangpol Halmahera Utara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara, PT NHM serta Liaison Official dari Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, atau dari Pemohon Pihak Terkait karena Halmahera Utara hanya 2 calon, Yang Mulia.

Adapun kesepakatan para pihak dalam rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 397 dan seterusnya tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilihan Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang ditandatangani oleh Termohon. Dimana Termohon menyatakan akan melakukan pelayanan penyaluran hak pilih kepada karyawan PT NHM dalam sesuai norma hukum pemilihan yang berlaku. Bahwa selanjutnya, 8 Desember 2020, berdasarkan surat 005 dan seterusnya perihal undangan tertanggal 7 Desember 2020 bertempat di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan rapat evaluasi persiapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara yang diikuti oleh Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Kepala Kesbangpol, Ketua DPRD Kabupaten, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Halmahera Utara serta Liaison Official pasangan calon Pemohon dan Pihak Terkait.

Adapun kesimpulan rapat tersebut dituangkan dalam notulensi rapat, baik Liaison Official dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sama-sama menolak dibentuknya TPS di PT NHM karena dianggap rawan dan tidak ada dasar hukumnya. Bahwa tidak dilaksanakannya pemungutan ... pemungutan suara PT NHM adalah karena tidak ada pembentukan TPS di PT Nusa Halmahera Minerals.

Bahwa adapun pembentukan TPS diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir diubah melalui Undang-Undang 6 Tahun 2020, mohon bunyi ayatnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa Adapun yang dimaksud tempat yang mudah dijangkau adalah tempat dimana

rukun tetangga ataupun rukun warga dalam desa atau kelurahan atau sebutan lain tempat pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini senada dengan Pasal 7 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penggunaan hak pilih bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih pada TPS yang mana pemilih terdaftar dalam DPT. Bahwa setiap pemilih hanya terdaftar dalam 1 daftar pemilih di PPS dalam setiap desa atau kelurahan atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PKPU 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan PKPU 17 Tahun 2020.

Bahwa adapun yang dimaksud PPS adalah panitia pemungutan suara, ini dianggap dibacakan saja, Yang Mulia. Bahwa penyusunan DPT yang dilakukan oleh Termohon dimulai dari proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas penyortiran data pemilih. Dimana berdasarkan PKPU 19 Tahun 2007 ... 2019 perubahan PKPU 2 Tahun 2017. Tidak diatur proses pencocokan dan penelitian data pemilih di dalam pertambangan seperti PT NHM. Sehingga tidak ada ... sehingga tidak ada mengenai pembentukan TPS khusus dipertambangan dan juga tidak diatur pemungutan penghitungan suara di pertambangan.

Bahwa berbeda halnya dengan pengaturan pada rumah tahanan yang berdasarkan PKPU 19 Tahun 2019, perubahan PKPU 2 Tahun 2017 diatur memiliki kegiatan pemukhtahiran pemilih ... data pemilih pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit. Se ... sebagaimana diatur dalam Pasal 33A PKPU 19 Tahun 2019. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemukhtahiran data pemilih dalam rumah tahanan lembaga pemasyarakatan dan ... dan/atau rumah sakit atau dalam surat KPU RI Nomor 818 dan seterusnya tertanggal 25 September 2020.

Bahwa berdasarkan hukum pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa pembentukan TPS berkaitan dengan penyusunan DPT untuk memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya. Vide Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 8 2015 juncto Pasal 7 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2020. Oleh sebab itu, penyusunan DPT berbasiskan desa atau kelurahan atau sebutan lain alamat pemilih. Vide Pasal 6 ayat (1) PKPU 2 Tahun 2017.

Dengan pendataan pemilih yang hanya terdaftar pada 1 TPS adalah untuk memastikan 1 pemilih menggunakan hak pilihnya hanya sekali. Bahwa pertanyaan hukumnya adalah apakah PT NHM Mineral adalah desa, kelurahan atau sebutan lain atau bukan. Sudah tentu PT NHM bukan desa, kelurahan atau sebutan lain sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum pemilihan dan juga tidak ada pengaturan mengenai proses pemukhtahiran data pemilih pada pertambangan seperti PT NHM. Tidak ada pengaturan mengenai pembentukan TPS khusus pada pertambangan hingga tidak ada proses pemungutan dan penghitungan suara di pertambangan adalah karena karyawan tambang berdasarkan norma hukum pemilihan wajib diliburkan untuk dapat

menggunakan hak pilih pada TPS tempat karyawan tersebut terdaftar dalam DPT. Oleh sebab itu, berdasarkan norma hukum pemilihan Pemohon tidak membentuk TPS pada PT NHM mineral ... PT Nusa Halmahera Mineral.

Bahwa sekalipun tidak ada TPS di PT NHM, bukan berarti bahwa Halmahera Utara yang bekerja di PT NHM tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Termohon tetap memastikan bahwa karyawan PT NHM mineral terdaftar dalam daftar pemilih tetap sehingga para karyawan PT NHM tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa alasan PT NHM Mineral meminta pembentukan TPS Khusus karena situasi operasional tambang Gosowong, PT NHM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara sehingga berharap agar Termohon dapat memfasilitasi TPS yang dapat dijangkau oleh karyawan PT ... karyawan dan mitra PT NHM tanpa harus keluar dari kawasan tambang untuk dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa berinteraksi dengan orang lain dengan jumlah yang banyak adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut norma hukum pemilihan karena tidak diatur mengenai TPS khusus di perusahaan pertambangan.

311. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

1 menit lagi.

312. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia, kalau begitu Termohon ingin masuk ke data karyawan PT NHM, Yang Mulia.

Data karyawan PT NHM yang diberikan kepada Termohon itu berjumlah 632 orang, Yang Mulia. Setelah dilakukan pendataan atau disanding data dengan DPT, Yang Mulia, yang terdaftar adalah 347 orang, Yang Mulia. Dari 347 orang itu ada 30 orang yang ganda ... data ganda sehingga bersihnya DPT-nya adalah 317 orang, Yang Mulia. Jumlah karyawan ter ... karyawan PT NHM dari 317 orang itu yang terdaftar dalam DPT dalam Kecamatan Malifut yang tersebar di 20 desa yang paling dekat dengan tempat operasional PT NHM adalah 126 orang. Karyawan PT NHM yang terdaftar dalam DPT di luar Kecamatan Malifut tersebar di 12 kecamatan dan menggunakan form A-5 yang dikeluarkan oleh Termohon yang tersebar di 8 TPS di 5 desa dalam Kecamatan Malifut yakni Desa Tobobo, Bukit Tinggi, Tahane, Sosol, Balisosang itu 58 orang, Yang Mulia. Sementara dari 632 orang itu, yang dimasukkan data karyawan PT NHM yang bukan karyawan PT NHM adalah 133 orang, Yang Mulia. Itu berarti bahwa total karyawan PT NHM dari 632 yang

dimasukkan ke Termohon adalah 184 orang. Terdiri dari 126 orang di Kecamatan Malifut, dan 58 orang di luar Kecamatan Malifut.

Adapun yang menggunakan hak pilih, Termohon rekap dalam tabel 1.5, Yang Mulia. Bahwa karyawan PT NHM juga menggunakan hak pilih. Memang tidak semua menggunakan hak pilih tetapi apa bedanya orang yang tidak menggunakan hak pilih di karyawan PT NHM dengan TPS yang lain? Toh, ini kan adalah hak bukan kewajiban untuk menggunakan hak pilih karena pada prinsipnya (...)

313. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, waktunya habis.

314. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia.

315. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan sekarang ke Pihak Terkait! Pokok-pokoknya saja, ya!

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 57: HERRY HIORUMA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021. Kami akan membacakannya yang ... yang pokok-pokoknya, selanjutnya dianggap dibacakan.

Dalam eksepsi.

Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister dengan Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pemohon tidak mengurai secara jelas dan tegas dalam pokok permohonan mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Sebagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, maka terhadap pelanggaran tersebut baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka hal itu semestinya diselesaikan

melalui lembaga-lembaga lainnya yang diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Bahwa selain yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sengketa proses dan tidak ada hubungannya dengan perolehan suara. Pemohon tidak mengajukan keberatan atas TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan hanya pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa persoalan yang disengketakan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah sengketa mengenai proses dan bukan merupakan sengketa hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020. Dimana sengketa yang demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Untuk itu patut dalam beralasan hukum apabila Mahkamah mengatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel.

Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya. Yang menguraikan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan perhitungannya. Ada pada tingkat mana, tempatnya dimana dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya. Namun Pemohon dalam pokok permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi tanpa dasar adanya pelanggaran di beberapa tempat pemungutan suara di TPS yakni TPS 4 Desa Bobane Igo, TPS 1 Desa Barumadehe, TPS 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa dengan tidak merinci perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait akan berakibat terhadap perolehan hasil suara jika Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu dengan tidak merinci perolehan suara, untuk Pemohon dan perolehan suara untuk Pihak Terkait masing-masing TPS tersebut, maka sangat beralasan bila permohonan Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas.

Bahwa karena Pemohon dalam positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan tidak pula menguraikan hasil perolehan suara yang sebenarnya menurut versi Pemohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk memberitahukan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya kecualli yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak ... dalam pokok perkara adalah mengenai sengketa proses yang lebih bersifat asumtif serta tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah. Bahwa dalil Pemohon ... permohonan Pemohon tidak berdampak terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan hanya bertujuan membangun narasi yang kabur dan tidak benar sehingga patut dikesampingkan. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan dalil, maka apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini.

Bahwa berdasarkan keputusan Termohon nomor 38 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, vide bukti PT-1. Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Pasangan Nomor Urut 1, Frans Manery dan Muhlisi Tapi Tapi memperoleh suara=50.697 suara.

Pasangan Nomor Urut 2 Joel B. Wogono dan Said Badjak, perolehan suara=50.078,

Sehingga jumlah suara sah=100.775.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Pihak Terkait berada pada urutan pertama sebagai peraih suara terbanyak. Bahwa penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilihan yang cukup baik. Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Bahwa seluruh dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 adalah tidak benar dan mengada-ada.

1. Bahwa dalil Pemohon huruf a, halaman 6, angka 1 sampai dengan angka 10, Yang Mulia, halaman 7 tentang tidak adanya pelaksanaan pemungutan suara di PT NHM adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Karena bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 tidak pernah ada pembentukan TPS di PT NHM. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sebelumnya momentum pemilihan presiden, pemilihan Gubernur Maluku Utara, pemilihan legislatif ataupun

pemilihan bupati tahun 2015, Termohon selalu memfasilitasi tempat pemungutan suara, TPS khusus kepada karyawan PT NHM-Gosowong. Penegasan di sini, Yang Mulia bahwa Termohon tidak pernah memfasilitasi adanya TPS di PT NHM pada momen-momen pilkada, pileg, yang pernah diselenggarakan di Kabupaten Halmahera Utara.

317. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

2 menit lagi.

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: HERRY HIORUMA

Untuk selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS-TPS yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar karena di TPS-TPS tersebut tidak terjadi persoalan, perhitungannya berjalan lancar, saksi-saksi dari Paslon Nomor Urut 2 juga menandatangani C.Hasil. Dan selanjutnya, di Kecamatan Loloda Kepulauan menyangkut dengan amplop tidak tersegel pada halaman 18, sama halnya bahwa karena segelnya tinggal 1, sehingga ada kesepakatan di situ terkait dengan saksi dalam pleno tingkat kecamatan, sehingga yang dipilih adalah segel kotak. Dan perhitungannya berjalan lancar, tidak ada keberatan, kemudian di tingkat kecamatan.

319. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, langsung petitum saja.

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: HERRY HIORUMA

Saya langsung pada petitum.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2/Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, pukul 00.10 WIT. Demikian, hormat Kuasa Pihak Terkait, Yang Mulia. Terima kasih.

321. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Sela ... yang terakhir dari Bawaslu. Silakan, Pak, ya, pokok-pokoknya juga, 10 menit ya!

322. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Assalamualaikum wr. wb.

323. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb.

324. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Dengan hormat, Yang Mulia. Perkenalkanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Yang Mulia, kami Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan keterangan dalam Perkara PHP Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut.

1. Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah Joel B. Wogono, S.H., dan Drs. Said Badjak, M.Si., melawan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

Objek permohonan dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon, adapun dalil Pemohon yang diajukan oleh Pemohon, antara lain, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaeten Halmahera Utara. Yang pertama, tidak dilaksanakannya pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals atau PT NHM. Pada tanggal 6 Desember Tahun 2020 PT NHM menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya pihak NHM menjelaskan situasi operasional tambang Gosowong PT NHM dan meminta kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk memfasilitasi TPS yang bisa dijangkau oleh karyawan atau pemilih tanpa berinteraksi dengan orang lain. Begitu pun dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara pernah melayangkan surat ke kabu ... ke KPU Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Halmahera Utara menghadirkan TPS di Gosowong untuk kemudahan dan kelancaran pemungutan suara bagi karyawan PT NHM.

Yang berikut. Sekitar pukul 13.40 WIT. Bertempat di Kantor Perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals di Tobelo telah diselenggarakan pertemuan antara Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, KPU Kabupaten

Halmahera Utara dengan pihak PT NHM yang pada pokoknya membahas terkait dengan pemilik PT Nusa Halmahera Minerals yang berjumlah 632 orang.

Yang berikut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam pertemuan tersebut belum ditemukan solusi karena KPU tetap pada pedoman teknis kerjanya dan pihak PT NHM Nusa Halmahera Minerals juga demikian.

Yang berikut, mengikuti perkembangan koordinasi antara KPU dengan pihak PT Nusa Halmahera Minerals, Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan surat pada KPU Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor 209/K Bawaslu Tahun 2020, tertanggal 7 Desember 2020, perihal himbauan agar dapat memfasilitasi permintaan penyediaan TPS di PT Nusa Halmahera Minerals sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Halmahera Utara melakukan rapat koordinasi dengan menghadirkan pihak PT Nusa Halmahera Minerals. Bahwa, Bawaslu Halmahera Utara, pemerintah daerah, Tim Satgas Covid-19 Halmahera Utara, Dandim 1508 dan penghubung ... penghubung kedua pasangan calon dan rapat dengar pendapat antara KPU, Bawaslu Halmahera Utara, juru bicara Covid-19, perkwakilan PT Nusa Halmahera Minerals, dan Kesbangpol Halmahera Utara. Sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 397/PL Tahun 2020 tentang kesepakatan pelayanan pemilih, karyawan PT Nusa Halmahera Minerals tertanggal 7 Desember 2020.

Bedasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara terkait dengan dinamika yang terjadi dalam rapat tersebut dimentahkan akibat dari perdebatan soal keamanan dan prosedur pemungutan suara. Oleh karenanya, dalam ... dimintakan pihak NHM agar kooperatif dan KPU siap untuk memberikan Form A5 bagi pemilih atau karyawan di PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar di DPT, termasuk akan melayani pemilih karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang berada di hotel.

Selanjutnya, pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Malifut pada proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Tobobo, TPS 01, TPS 02, pada tanggal 9 Desember 2020 tahun ... tahun 2020 yang merupakan lokasi beroperasinya PT Nusa Halmahera Minerals. Begitupun Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020, saksi-saksi pasangan calon juga turut menghadiri rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut.

Yang berikut, terdapat dua orang yang menggunakan E-KTP untuk memilih di TPS 2, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk yang bukan warga Tetewang. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kao Teluk pada tanggal 9 Desember 2020 terdapat dua orang pemilih tambahan memem ... melakukan pencoblosan dengan

menggunakan E-KTP atas nama Arnold Wattimury, Desa Tioua, Kecamatan Tobelo ... Tobelo Selatan dan Pithein Tadjibu, Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat.

Yang berikut. Atas peristiwa tersebut, bawa ... Panwaslu kelurahan atau desa secara langsung meminta agar keduanya dapat menunjukkan Formulir Model A5-KWK kepada TPS atau KPPS. Akan tetapi, keduanya tidak dapat menunjukkan Formulir Model A5-KWK.

Yang berikut. Keberatan disampaikan pada saat rekapitulasi pleno tingkat kabupaten yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Calvin D. F. Dorhungi, berdasarkan Model D.Hasil ... berdasarkan Model Kejadian Khusus terkait dengan adanya pengguna hak pilih DPTb yang bukan warga Desa Tetewang, yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Tetewang.

Terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Halmahera Utara telah menetapkan sebagai temuan yang kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 214/BAWASLU-HU/PM Tahun 2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Tertanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya, KPU Halmahera Utara telah menyampaikan Surat Nomor 205/PP tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara yang pada pokoknya kabu ... KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu terkait dengan pemungutan suara ulang PSU di T ... di TPS 02 Desa Tetewang tanggal 15 Desember 2020.

Yang berikut, TPS 04, Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk terkait dengan salah satu pemilih DPTb atas nama Buharnudin Asam yang menggunakan NIK, bukan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara.

Terkait dengan pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, keberatan juga disampaikan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Calvin F. Dorohui berdasarkan Model D.Kejadian Khusus terkait dengan jumlah pemilih di daftar hadir lebih banyak dari surat suara. NIK DPTb dalam daftar hadir dianggap tidak benar.

Yang berikut TPS 01 Desa Barumadehe, Kecamatan Tau Teluk terkait dengan daftar hadir belum ... daftar hadir pemilih yang bukan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara atas nama Arisman Wahab dan Zulkarnain M. terkait dengan keberatan atau dalil Pemohon yang disampaikan oleh Pihak Pemohon, keberatan juga disampaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Calvin F. Dorohui berdasarkan Model D.Kejadian Khusus terkait dengan jumlah pemilih di daftar hadir lebih banyak dari kertas suara terpakai.

Yang berikut. TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat serta kos ... serta TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Terkait dengan dalil pokok Pemohon yang didalilkan

oleh Pemohon keberatan juga disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pleno rekapitulasi pada tingkat kabupaten yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Calvin F. Dorohui berdasarkan Model D.Kejadian Khusus terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Yang berikut. TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo terkait dengan dugaan Kepala Desa Rawajaya mengambil dan membagikan surat undangan kepada pemilih dan angka ... pemilih dan angka pemilih DPTb yang menggunakan e-KTP yang sangat tinggi. Terhadap dugaan Kepala Desa Rawajaya mengambil dan membagikan surat undangan kepada pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Tobelo pada hari kedua distribusi Formulir C.Pemberitahuan oleh KPPS TPS 02 Desa Rawajaya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, Ketua KPPS TPS 02 Desa Rawajaya atas nama Saudari Jumiarti memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada kepala Desa Rawajaya dengan jumlah Formulir C.Pemberitahuan yang diberikan sebanyak kurang lebih 20 lembar. Peristiwa ini diketahui oleh PPS Desa Rawajaya pada malam hari atas laporan dari teman-teman KPPS, sehingga anggota PPS memerintahkan ketua KPPS TPS 02 Desa Rawajaya untuk mengambil Formulir C.Pemberitahuan tersebut. Ketua KPPS 0 ... TPS 02 Desa Rawajaya kemudian memastikan apakah Form C.Pemberitahuan yang sudah diberikan itu telah diterima oleh masyarakat sesuai dengan nama yang tercantum dalam Form C.Pemberitahuan atau tidak.

Yang berikut. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Tobelo pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember tidak ditemukan adanya keberatan sanggahan dan ... dari saksi pasangan calon, tidak pula diajukan sebagai laporan oleh pihak mana pun dan/atau ditetapkan sebagai temuan oleh Panwaslu maupun Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.

Yang berikut. Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Tobelo dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, khusus TPS 07 Desa Rawajaya. Saksi 02 mengajukan keberatan terkait dengan penggunaan hak pilih memakai E-KTP yang terdaftar di DPTb sebanyak 107 orang dan saat itu di ... dan saat itu juga saksi meminta bukti fisiknya, Panwaslu Tobelo kemudian merekomendasikan agar membuka kotak suara di TPS 07 Desa Rawajaya untuk mencocokkan daftar hadir dan daftar hadir DPTb.

Selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tobelo sebagaimana laporan hasil pengawasan LHP, Panwaslu Tobelo hingga pada akhirnya ditutup dengan resmi oleh Ketua PPK Tobelo pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020.

Yang berikut. TPS 05 Desa Gorua Selatan.

325. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

2 menit lagi, Pak, ya. Diambil intinya saja, mana yang jadi rekomendasi Bawaslu dan mana yang ditindaklanjuti dan mana yang tidak ... tidak ditindaklanjuti.

326. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Saya lanjut di (...)

327. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tadi rekap kecamatan, sudah. Rekap kabupaten?

328. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Ya. Yang berikut terkait dengan keberatan yang berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Dalil Pemohon berhubungan dengan peristiwa dugaan Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery melakukan penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan pemerintah yang terjadi pada tanggal 7 September 2020 di Desa Mekarti, Kecamatan Kao Barat. Atas peristiwa tersebut Bawaslu Halmahera Utara mengeluarkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 121/K tahun 2020 perihal Penerusan pelanggaran administrasi tertanggal 21 September 2020 berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 24/BA tahun 2020 tentang Peristiwa Dugaan Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Program Dan Kegiatan Pemerintah Tertanggal 19 September tahun 2020.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Halmahera Utara kemudian mengeluarkan Surat Nomor 129 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tertanggal 28 hal ... tanggal 28 September tahun 2020. Namun, atas rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.

Yang berikut. Keberatan juga disampaikan oleh Pihak Pemohon terkait dengan keterlibatan aparatur sipil negara atau kepala desa. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Halmahera Utara terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan keterlibatan aparatur sipil negara atas nama Saudara Muhammad Kacoa, telah dilakukan penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 71 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Praktik Politik Uang Pada Pilkada Halut Tahun 2020, tertanggal 25 Januari 2021 dan memutuskan tidak

memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara.

Yang berikut, terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, serta Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK akan dijelaskan sebagai berikut.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Ir. Frans Manery dan Muhlis Tapi Tapi, S.Ag dengan perolehan suara sebanyak 50.697. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Joel B. Wogono, S.H., dan Said Bajak, M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 50.078.

Demikian, keterangan ini dapat kami sampaikan di hadapan sidang Majelis Yang Mulia. Keterangan tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Ahmad Idris S.E, anggota. Rafli Kamaluddin S.T, Ketua. Saya sendiri Iksan Hamiru S.Ap, anggota. Terima kasih, wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

329. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb. Baik, konfirmasi, itu tadi kop ... fotokopinya sudah selesai?

330. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 9/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sudah, Yang Mulia.

331. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya nanti dibagikan, ya? Saya konfirmasi terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi. Silakan Komisionernya, yang di belakang, ya? Ya.

332. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Baik, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

333. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb.

334. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Ya untuk penetapan rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Halmahera Utara menetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.10 WIT.

335. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 00.10 WIT, ya? Kemudian, pengumumannya di papan?

336. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Ya, pengumumannya juga via laman Facebook KPU Halmahera Utara, kemudian (...)

337. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Laman website atau Facebook?

338. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Di laman juga, kemudian di papan pengumuman di kantor KPU juga kami (...)

339. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini laman KPU-nya kan? Website-nya KPU?

340. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Ya, ya laman ... laman.

341. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lamannya tuh kapan?

342. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Saat itu juga setelah di (...)

343. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 16 pukul 00.10 WIT itu juga?

344. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Siap, Yang Mulia.

345. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian di papan?

346. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Di papan saat itu juga pascarapat pleno ditutup, kemudian kami menuju kantor dan sekaligus menempel BA keputusan itu di papan informasi kantor KPU Halmahera Utara.

347. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini hadir semua ya pada saat ini, ya?

348. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Hadir.

349. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hadir semua?

350. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Siap, Yang Mulia.

351. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanda tangan semua?

352. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Pemohon menolak mendandatangani tapi meminta untuk diberikan salinan (...)

353. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Salinan dari hasil rekapnya itu (...)

354. TERMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL DJALIL

Hasil rekapitulasi.

355. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kemudian terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu tadi ada berapa ... berapa saja yang tidak ditindaklanjuti, Pak?

356. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara yang pertama rekomendasi Bawaslu terkait dengan Bupati Halmahera Utara yang melanggar (...)

357. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mengguna ... menyalahgunakan kewenangannya tadi?

358. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Ya, melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016.

359. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kemudian?

360. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Yang berikut terkait dengan rekomendasi PSU (Pemilihan Suara Ulang) di TPS 02 Desa Tetewang.

361. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

TPS 02, ya. Yang di PT NHM itu gimana, Pak?

362. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Kalau di PT NHM, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara hanya mengeluarkan surat himbauan ke KPU Kabupaten Halmahera Utara agar supaya KPU Kabupaten Halmahera Utara mempertimbangkan surat gugus tugas Covid-19 terkait dengan permintaan TPS di PT Nusa Halmahera mine ... Minerals.

Yang kedua, agar supaya KPU Kabupaten Halmahera Utara juga mempertimbangkan surat PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terkait dengan permintaan TPS di PT Nusa Halmahera Minerals (...)

363. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pembentukan TPS-nya, ya. Yang terkait dengan keberatan adanya di mana itu, Pak?

364. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Keberatan terkait dengan keberatan (...)

365. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dengan kondisi khusus, segala macam, ada dimana?

366. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Terkait dengan keberatan, itu disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 02 pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten.

367. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah masuk sini, dalam lapo ... apa ... keterangan tadi sudah ada, ya?

368. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Sudah.

369. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, buktinya sudah lengkap ya di situ?

370. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Sudah ... sudah, lengkap.

371. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik, dari saya itu saja klarifikasinya. Saya kembalikan, Pak Ketua.

372. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada.

373. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya konfirmasi ke Bawaslu. Tadi disebutkan rekomendasi dari Bawaslu yang tidak dilaksanakan itu tentang pertama, pemungutan suara di PT Nusantara Halmahera Minerals. Kemudian rekomendasi yang terkait dengan dua pemilih yang bukan warga negara ... warga Desa Tetewang, ya?

374. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Ya.

375. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian rekom ... bagaimana rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan oleh Termohon berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan Paslon Nomor 1, pelanggaran berupa menggunakan kewenangan program kegiatan menguntungkan, itu juga tidak?

376. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Ya, itu juga tidak ditindak lanjut oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.

377. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kemudian, tindak lanjut terhadap Surat Bawaslu Nomor 299 itu juga tidak?

378. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Gimana?

379. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang dua ... surat (...)

380. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Surat Bawaslu (...)

381. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nomor 299.

382. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Terkait dengan himbauan ke KPU Kabupaten Halmahera Utara.

383. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, di situ tidak dilaksanakan juga?

384. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Ya, tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.

385. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan. Makasih, ya, itu saja.

386. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

387. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Izin, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia. te ... Termohon, Yang Mulia.

388. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Dari Termohon?

389. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

390. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

391. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. mohon maaf, Termohon belum menyampaikan beberapa hal karena tadi hanya waktu yang terbatas untuk menyampaikan pokok-pokok jawaban kaitannya dengan rekomendasi (...)

392. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Agak keras dong suaranya, ini masa kalah sama saya. Lebih keras dari saya dong. Yuk.

393. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. kaitannya dengan Pasal 71 ayat (3) tentang Penggunaan Program yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Itu Bawaslu Halmahera Utara keliru, Yang Mulia, karena itu telah ditindaklanjuti oleh KPU Halmahera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 (...)

394. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, sekarang begini saja.

395. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya.

396. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Buktinya sudah ada belum?

397. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap. Kami lampirkan buktinya, Yang Mulia.

398. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Buktinya, bukti berapa saja, buktinya?

399. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap, Yang Mulia.

400. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan bantahan-bantahan kan menunjukkan bukti yang penting.

401. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap, Yang Mulia. Bukti T-35 (...)

402. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semua ada bukti ini kalau tidak ada bukti susah kita.

403. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap. Bukti T-35 sampai bukti ke (...)

404. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti T-35, bukti berapa lagi?

405. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sampai Bukti T-44, Yang Mulia.

406. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti T?

407. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Bukti T-44.

408. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti T-35 itu untuk mem ... yang terkait dengan apa?

409. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Rekomendasi Pasal 71 ayat (3), Yang Mulia.

410. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Rekomendasi tadi, penyalahgunaan (...)

411. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia. baik (...)

412. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus yang T-44?

413. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sampai ... itu satu kesatuan dalilnya, Yang Mulia. Jadi masing-masing dalil ada buktinya di situ, Yang Mulia, satu (...)

414. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ini terkait dengan rekomendasi yang mana yang T-44 ini?

415. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Pasal 71 ayat (3) itu mulai (...)

416. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama juga?

417. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

418. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Masih ada lagi?

419. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Baik, Yang Mulia. kaitannya dengan rekomendasi Bawaslu di TPS 2 Tetewang, Yang Mulia.

420. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

421. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Rekomendasi Bawaslu itu untuk PSU paling lambat dua hari setelah pemungut hitung.

422. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu T berapa dari Termohon?

423. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, T-15, Yang Mulia

424. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-15 terkait dengan PSU tadi, ya?

425. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

426. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

427. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Bahwa (...)

428. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, menurut anggapan dari Termohon terlambat, begitu kan kurang lebih?

429. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

430. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu saja? Ada lagi? Tambahan.

431. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap, Yang Mulia. sejauh ini (...)

432. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T berapa?

433. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sejauh ini rekomendasi dari Bawaslu kepada Termohon kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan yang masuk di dalil permohonan cuma dua itu, Yang Mulia.

434. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Sudah itu saja?

435. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASI

Terima kasih, Yang Mulia.

436. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, makasih.

437. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Izin, Yang Mulia, dari Pemohon boleh? Dari Pemohon Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. Kalau diperkenankan saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan keterangan dari Bawaslu Halmahera Selatan, Yang Mulia.

439. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang mau diinikan?

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Ya, di (...)

441. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Anda mau menambahkan bukti?

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Tidak, Yang Mulia.

443. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ini hanya bukti saja.

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Siap, Yang Mulia.

445. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti. Nanti persoalan itu apa lanjut atau tidak itu nanti, tunggu hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Ya.

447. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Gitu.

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021: ISKANDAR SONHADJI

Terima kasih, Yang Mulia.

449. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk Termohon Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-85?

450. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 57/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

451. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian P ... PT-1 sampai dengan PT-30 untuk Pihak Terkait, benar?

452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: HERRY HIORUMA

Benar, Yang Mulia.

453. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-58, benar?

454. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA: IKSAN HAMIRU

Benar, Yang Mulia.

455. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-64 sampai dengan P-79, benar?

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021: NOFEBI ETEUA

Benar, Yang Mulia.

457. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, baik. Hasil sidang ini akan disampaikan atau dilaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Kemudian, untuk penundaan sidang selanjutnya Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan kapan hari, tanggal, dan jamnya, ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 5 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

